



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

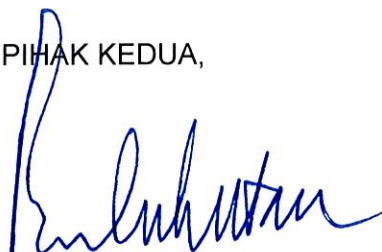
1. Nama : Jodi Mahardi
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

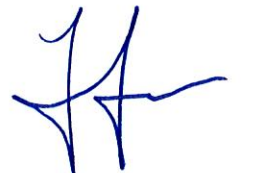
Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,



Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,



Jodi Mahardi

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%
		2	Indeks Kedaulatan Maritim	79
		3	Efektivitas Diplomasi Maritim	76
SP.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Berkualitas	4	Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
		5	Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Efektif dan Efisien	6	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85
		7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76

NO	RINCIAN OUTPUT (RO)/KOMPONEN	ANGGARAN
1	Rekomendasi Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 1.756.791.000
2	Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 10.710.496.000
3	Rekomendasi Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Rp 27.167.997.000
4	Rekomendasi Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 1.884.294.000
5	Rekomendasi Kebijakan Energi	Rp 1.710.422.000
6	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 800.000.000
7	Dukungan Manajemen Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 2.200.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 46.230.000.000

Jakarta, Januari 2024

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi



Luhut B. Pandjaitan

Deputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi



Jodi Mahardi

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

NO	INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi				✓
2	Indeks Kedaulatan Maritim	Indeks Kedaulatan Maritim				✓
3	Efektivitas Diplomasi Maritim	Efektivitas Diplomasi Maritim				✓
4	Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi	✓	✓	✓	✓
		2. Rancangan Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim	✓	✓	✓	✓
		3. Rancangan Kebijakan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	✓	✓	✓	✓
		4. Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	✓	✓	✓	✓
		5. Rancangan Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional	✓	✓	✓	✓
		6. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	✓	✓	✓	✓
5	Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan	1. Direktif Presiden/Pimpinan Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Emerging Economies Cooperation/Global South Collaboration	✓	✓	✓	✓
		2. Direktif Presiden/Pimpinan Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia - Singapura terkait Realignment FIR, DCA, dan Ekstradisi	✓	✓	✓	✓
		3. Direktif Presiden/Pimpinan Penguatan Kerangka Institusional AIS Forum (tindak lanjut <i>leaders declaration</i> AIS Forum)	✓	✓	✓	✓

NO	INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
6	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				✓
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				✓

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi

Jodi Mahardi

MATRIKS DUKUNGAN PENCAPAIAN KINERJA MENKO TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE CASCADING	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI
Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	7,92	Indirect	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kepemimpinan Maritim	≥3	Indirect		Indeks Kedaulatan Maritim	79	Tahunan
					Efektivitas Diplomasi Maritim	76	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100%	Direct	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Berkualitas	Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Triwulanan
	Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Direct		Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Triwulanan
Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	85,1	Indirect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Efektif dan Efisien	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	85	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	76	Tahunan

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim dan Energi

Jodi Mahardi